

Peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup

1. Undang undang RI
2. Fatwa mahkamah agung
3. Peraturan pemerintah
4. Keputusan presiden
5. Keputusan menteri
6. Peraturan daerah tk I
7. Keputusan gubernur
8. Peraturan daerah tk II
9. Keputusan bupati atau walikota
10. Lain lain: Instruksi, surat edaran, SK tk Dirjen, SK tk Direktorat dll.

Undang undang yang berhubungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup

1. **Undang undang RI No 23 Th 1997 *Ttg pengelolaan lingkungan hidup***
2. Undang undang RI No 41 Th 1999 *Ttg kehutanan*
3. Undang undang RI No 22 Th 2001 *Ttg minyak dan gas bumi*
4. Undang undang RI No 27 Th 2003 *Ttg panas bumi*
5. Undang undang RI No 7 Th 2004 *Ttg sumber daya air*

Fatwa Mahkamah Agung RI

- Fatwa Mahkamah Agung No KMA/114/IV/1990 Ttg penyerahan hasil penyidikan PPNS kepada penuntut umum
Catatan: PPNS singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi institusi kepolisian RI untuk mengeluarkan JUKNIS/16/VII/1991, JUKNIS/17/VII/1991 dan JUKLAK/37/VI/1991 yg ditandatangani oleh Direktur Reserse a/n KAPOLRI, Deputi KAPOLRI Bidang Operasi
- Fatwa MA bersama-sama dg Peraturan Menteri Kehakiman No M.18.PW.07.03 Th 1993 lebih lanjut menjadi dasar hukum untuk merevisi JUKNIS dan JUKLAK tsb melalui SK KAPOLRI No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 Ttg revisi himpunan JUKLAK dan JUKNIS proses penyidikan tindak pidana.

- SK KAPOLRI tsb meliputi pengesahan:
 - Bujuklak ttg proses penyidikan tindak pidana,
 - Bujuklap ttg penanganan tempat kejadian perkara,
 - Bujuklap ttg penyelidikan,
 - Bujuklap ttg penindakan,
 - Bujuklap ttg pemeriksaan,
 - Bujuklap ttg sumpah/janji saksi dan saksi ahli di tingkat penyidikan,
 - Bujukmin ttg penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,
 - Bujukmin ttg pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam proses penyidikan,
 - Bujuklap ttg pra peradilan,
 - Bujuklap ttg koordinasi dan pengawasan serta pembinaan teknis penyidik Polri terhadap penyidik pegawai negeri sipil, dan
 - Bujukmin ttg tata cara penyelenggaraan administrasi penyidikan.

Peraturan pemerintah

- PP No 68 Th 1998 Ttg kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- **PP No 27 Th 1999 Ttg analisis mengenai dampak lingkungan**
Isinya a.l.: Kewajiban memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL bagi rencana usaha dan atau kegiatan (BAB I pasal 3)
- PP No 41 Th 1999 Ttg pengendalian pencemaran udara
- PP No 10 Th 2000 Ttg tingkat ketelitian peta utk penataan ruang wilayah RI

Peraturan pemerintah (ljtn)

- PP No 34 Th 2002 Ttg tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- PP No 35 Th 2002 Ttg dana reboisasi
- PP No 63 Th 2002 Ttg hutan kota
- PP No 40 Th 2003 Ttg tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kantor MNLH
- *PP No 1 Th 2004 Ttg perubahan atas Undang undang No 41 Th 1999 Ttg kehutanan*

Keputusan Presiden

- Keppres No 62 Th 2000 Ttg koordinasi penataan ruang nasional
- Keppres No 63 Th 2000 Ttg badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman nasional
- Keppres No 76 Th 2000 Ttg pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik
- *Keppres No 83 Th 2002 Ttg perubahan atas Keppres No 23 Th 2001 Ttg tim koordinasi pengelolaan sumber daya air*

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

- Kep MENLH No Kep-35/MENLH/10/1993
Ttg ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor
- Kep MENLH No Kep-13/MENLH/3/1995
Ttg baku mutu emisi sumber tidak bergerak
- Kep MENLH No Kep-48/MENLH/11/1996
Ttg baku tingkat kebisingan
- Kep MENLH No Kep-49/MENLH/11/1996
Ttg baku tingkat getaran
- Kep MENLH No Kep-50/MENLH/11/1996
Ttg baku tingkat kebauan
- Kep MENLH No Kep-45/MENLH/1997
Ttg indeks pencemaran udara

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No Kep.30/MENLH/10/1999 Ttg panduan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan**
- **Kep MENLH No 2 Th 2000 Ttg panduan penilaian dokumen AMDAL**
- **Kep MENLH No 3 Th 2000 Ttg jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan**
- ***Peraturan menteri negara LH No 4 Th 2000 Ttg panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan pemukiman terpadu***
- **Kep MENLH No 17 Th 2001 Ttg jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan**

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, a.l.:

No	Jenis rencana usaha/kegiatan	Besaran
1	Bidang pertambangan dan energi	
B	Ketenagalistrikan	
1	Transmisi	≥ 150 KV
4	PLTP	≥ 55 MW

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No 2 Th 2000 Ttg panduan penelitian dokumen AMDAL**
- **Kep MENLH No 56 Th 2002 Ttg pedoman umum pengawasan penataan lingkungan hidup bagi pejabat pengawas**
- **Kep MENLH No 57 Th 2002 Ttg tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup di kementerian lingkungan hidup**
- **Kep MENLH No 58 Th 2002 Ttg tatakerja pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota**
- **Kep MENLH No 86 Th 2002 Ttg pedoman pelaksanaan UKL dan UPL**

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No 127 Th 2002 Ttg program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan**
- **Kep MENLH No 129 Th 2002 Ttg tim teknis penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan**
- **Kep MENLH No 28 Th 2003 Ttg pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit**
- **Kep MENLH No 29 Th 2003 Ttg pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit**

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No 37 Th 2003 Ttg metode analisis kualitas air permukaan dan pengambilan contoh air permukaan**
- **Kep MENLH No 110 Th 2003 Ttg pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air**
- **Kep MENLH No 111 Th 2003 Ttg pedoman mengenai syarat dan tatacara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air**
- **Kep MENLH No 112 Th 2003 Ttg baku mutu air limbah domestik**
- **Kep MENLH No 113 Th 2003 Ttg baku mutu air limbah bagi usaha dan atas kegiatan pertambangan batu bara**

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No 114 Th 2003 Ttg pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air**
- **Kep MENLH No 115 Th 2003 Ttg pedoman penentuan status mutu air**
- Kep MENLH No 128 Th 2003 Ttg tatacara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis
- Kep MENLH No 129 Th 2003 Ttg baku mutu usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi
- **Kep MENLH No 141 Th 2003 Ttg ambang batas emisi gas buang kendaraan tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi**

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- ***Kep MENLH No 142 Th 2003 Ttg perubahan atas Kep MENLH No 111 Th 2003 Ttg pedoman mengenai syarat dan tatacara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air***
- Kep MENLH No 19 Th 2004 Ttg pedoman pengelolaan pengadilan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- Kep MENLH No 49 Th 2004 Ttg pendelegasian kewenangan untuk menandatangani surat keputusan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Ijtn)

- **Kep MENLH No 51 Th 2004 Ttg baku mutu air laut**

Lampiran II: Baku mutu air laut utk wisata bahari a.l.:

No	Parameter	Satuan	Baku mutu
FISIKA			
1	Warna	Pt Co	30
2	Bau	-	Tidak berbau
3	Kecerahan	M	>6
4	Kekeruhan	NTU	5
5	Padatan tersuspensi total	Mg/l	20
	Dst.		
KIMIA			
1	pH	-	7-8.5
2	Salinitas	-	Alami
3	Oksigen terlarut	Mg/l	>5
4	BOD5	Mg/l	10
	Dst		
	Logam terlarut		
12	Raksa (Hg)	Mg/l	0.002
	Dst		

Keputusan Kepala BAPEDAL

- **Kep Kepala BAPEDAL No Kep-105 Th 1997 Ttg panduan pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL)**
- **Kep Kepala BAPEDAL No Kep-107 Th 1997 Ttg pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks pencemaran udara**
- **Kep Kepala BAPEDAL No 08 Th 2000 Ttg keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL**
- **Kep Kepala BAPEDAL No 09 Th 2000 Ttg pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)**

Lampiran I: Pedoman penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL)

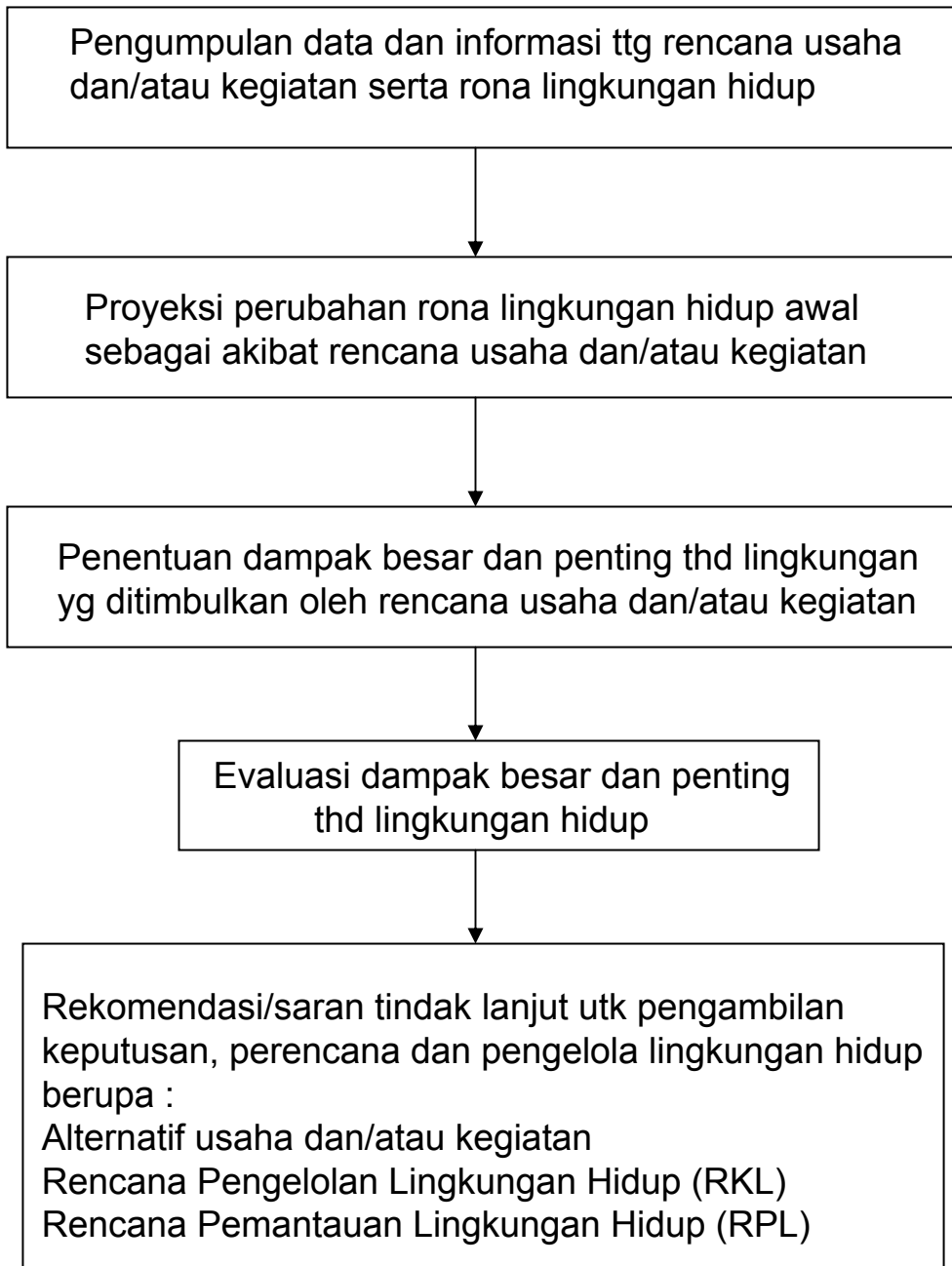
Lampiran II: Pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL)

Lampiran III: Pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)

Lampiran IV: Pedoman penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)

Lampiran V: Pedoman penyusunan ringkasan eksekutif

Diagram alir penyusunan ANDAL



Keputusan Menteri diluar MENLH

Keputusan Menteri Keuangan

- Kepmenkeu No 102/KMK.017/2000 Ttg pembentukan tim intern departemen dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembinaan sektor perumahan sederhana

Keputusan Menteri Perhubungan

- Kepmenhub No KM 17 Th 2000 Ttg pedoman penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia

Keputusan Menteri diluar MENLH (Ijtn)

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

- Kepmenhutbun No 104/KPTS-II/2000 Ttg tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa lain
- *Surat edaran Menhutbun No 561/MENHUTBUN-II/2000 Ttg tindak lanjut peraturan pemerintah No 25 Th 2000*
- *Kepmenhutbun No 132/KPTS-II/2000 Ttg pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti dokumen SKAB, BAKO dan SAHGBK*

Keputusan Menteri diluar MENLH (Ijtn)

Keputusan Menteri Kehutanan

- Kepmenhut No 13-I/Kpts-II/2000 Ttg kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan
- Kepmenhut No 31/Kpts-II/2001 Ttg penyelenggaraan hutan kemasyarakatan
- Kepmenhut No 32/Kpts-II/2001 Ttg kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan

Keputusan Gubernur

Keputusan Gubernur DKI Jakarta

- Kepgub DKI Jakarta No 19 Th 2000 Ttg uraian jabatan BAPEDALDA propinsi daerah khusus ibukota Jakarta
- SK Gub Ka DKI Jakarta No 277/2000 Ttg pendelegasian izin pembuangan limbah cair kepada Ka BAPEDALDA DKI Jakarta
- **SK Gub Prop DKI Jakarta No 670/2000 Ttg penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak di Prop DKI Jakarta**

Lampiran II BME utk PLTU, isinya a.l.:

No	Parameter	Batas maksimum (Mg/m ³)
1	Total partikel	150
2	Sulfur Dioksida	750
3	Nitrogen Oksida	850
4	Opasitas	20%

Catatan, a.l.:

- Volume gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Pemberlakuan BME utk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Kep Bupati Bandung No 11 Th 2001

- BAB I pasal 1 ayat 5: UKL-UPL adalah dokumen rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat.
- Babl pasal 1 ayat 6: SPPL adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat.
- BAB VI pasal 18: Dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi salah satu persyaratan terbitnya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Lampiran Keputusan Bupati, a.l.:

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	BESARAN
I	Bidang pertambangan dan energi	
A	Pertambangan umum	
1.	Luas perizinan	< 5000 Ha dan atau
	Luas daerah terbuka untuk pertambangan	< 100 Ha (kmltf/th)
2.	Tahap eksploitasi produksi	
	a. Batubara/gambut	< 1.200.000 ton/th
	b. Bijih primer	< 1.000.000 ton/th
	c. Bijih sekunder/Endapan alluvial	< 1.200.000 ton/th
	d. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	< 600.000 M ³ /th

Peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Peraturan Pemerintah

- **PP No 18 Th 1999 Ttg pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun**
- **PP No 85 Th 1999 Ttg perubahan atas PP No 18 Th 1999 Ttg pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun**
- **PP No 74 Th 2001 Ttg pengelolaan bahan berbahaya dan beracun**

Keputusan Kepala BAPEDAL

- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-68/BAPEDAL/05/1994 Ttg tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun**

Peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Keputusan Kepala BAPEDAL (Ijtn)

- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-01/BAPEDAL/09/1995 Ttg tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun**
- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-02/BAPEDAL/09/1995 Ttg dokumen limbah bahan berbahaya dan beracun**
- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-03/BAPEDAL/09/1995 Ttg persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun**

Peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Keputusan Kepala BAPEDAL (Ijtn)

- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-04/BAPEDAL/09/1995 Ttg tata cara persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun**
- **Kep Ka BAPEDAL No KEP-05/BAPEDAL/09/1995 Ttg simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun**